

MENUJU PARADIGMA *PEACEBUILDING* PASCA KONFLIK KEKERASAN*

(Review Terhadap Kerja-kerja Perdamaian di Daerah Konflik)



Irfan Abubakar

Program Koordinator Peace Studies and Conflict Resolution, CSRC UIN Jakarta

perdamaian dan mengikis konflik kekerasan, permusuhan, disharmoni sosial, dan sebagainya. Namun dalam situasi di mana konflik sudah mereda, seperti yang tampak di daerah-daerah bekas konflik, timbul pertanyaan, apakah *peacebuilding* masih relevan?

Tujuan *peacebuilding* sejatinya tidak hanya terbatas pada penghentian konflik dan penjagaan kesepakatan damai. Namun konsep ini mencakup kerja-kerja yang luas dan komprehensif baik pada saat konflik maupun pasca konflik. Selama konflik berlangsung, kerja-kerja perdamaian biasanya difokuskan pada intervensi konflik melalui mediasi atau fasilitasi dan rekonsiliasi. Tujuannya untuk mengelola dan melokalisir konflik sehingga tidak meluas ke mana-mana, dan sedapat mungkin diredakan. Selama fase-fase yang biasa disebut manajemen konflik dan resolusi konflik ini, fokus kerja *peacebuilding* biasanya bersifat jangka pendek, yaitu mendekonstruksi struktur kekerasan. Namun, setelah konflik kekerasan mere-

Pendahuluan

Kata “*peacebuilding*” atau “pembangunan perdamaian” biasa dikaitkan dengan kata “konflik”. Hal ini wajar-wajar saja karena secara *commonsense*, agenda *peacebuilding* lahir untuk merespons konflik kekerasan yang terjadi. Dengan demikian, *peacebuilding* bertujuan untuk mempromosikan

* Tulisan ini sebagian besar didasarkan pada laporan kegiatan Focused-Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta dalam rangka pengembangan modul-modul *peacebuilding* yang diadakan pada bulan Desember 2006 di empat kota: Banda Aceh, Pontianak, Ambon, dan Poso. Lalu ditajamkan dalam Workshop Pengembangan Modul *Peacebuilding* yang diadakan oleh CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di Hotel Seruni, Puncak Bogor, tanggal 14 Maret 2007.

da, kerja-kerja perdamaian lebih diarahkan kepada tujuan perubahan sosial berjangka panjang yang lebih menekankan rekonstruksi struktur damai dalam masyarakat.

Penekanan pada apa yang bisa disebut *post-conflict peacebuilding* (pembangunan perdamaian paska konflik) berangkat dari sebuah keyakinan bahwa damai bukanlah semata-mata ketiadaan perang. Damai yang sejati adalah damai yang dinamis, partisipatif, dan berjangka-panjang. Ia bisa terwujud manakala nilai-nilai kemanusiaan universal telah mengakar-menjalar di segala lini kehidupan praktis: keluarga, sekolah, komunitas, masyarakat dan negara.¹ Mengutip Albert Einstein, damai bukanlah sekadar absennya perang, melainkan adanya keadilan, hukum, dan ketertiban. Pendek kata, adanya pemerintahan yang efektif. UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan bahwa budaya damai tidak mungkin tercipta hanya dengan sekadar membangun kembali masyarakat yang pernah tercabik-cabik oleh konflik. Budaya damai haruslah dikembangkan dengan strategi transformasi relasi-relasi sosial yang konfliktual menuju hubungan kerjasama yang konstruktif sebelum

masyarakat jatuh ke dalam jebakan perang dan kehancuran.

Untuk lebih memahami konsep damai sejati, tabel di bawah ini mungkin dapat membantu memetakan perbedaan karakteristik antara damai sejati (damai positif) dengan damai palsu (damai negatif).² (Lihat tabel)

Klarifikasi pengertian dan cakupan *peacebuilding* di atas sengaja dilakukan untuk memberikan sedikit kerangka konseptual guna melihat sejauh mana orientasi kerja-kerja perdamaian dewasa ini telah mengarah kepada penciptaan budaya damai positif sebagaimana didefinisikan di atas. Tulisan ini tidak berpretensi untuk mengklaim bahwa para aktor perdamaian di Indonesia tidak menyadari atau kurang menekankan dimensi transformasi sosial dari *peacebuilding* yang mereka perjuangkan. Namun tidak juga berarti bahwa proses *peacebuilding* di Indonesia telah benar-benar mengacu kepada penciptaan budaya damai yang *genuine* di tengah masyarakat. Yang bisa dikatakan untuk sementara ini adalah bahwa berbagai aktor *peacebuilder* yang ada belum sungguh-sungguh mengonsolidasikan potensi besar yang dimiliki guna bersama-sama mendorong proses pembangunan perdamaian kepada tujuan-tujuan penciptaan damai yang

¹ State of the World Forum, *People Building Peace, 35 Inspiring Stories from Around the World*, (International Books: 1999), hlm. 22.

² Leo R. Sandy and Ray Perkins, Jr., "The Nature of Peace and Its Implications for Peace Education", dalam *The Online Journal of Peace and Conflict Resolution*, Issue 4.2, Spring 2002, dikutip dari http://www.trinstitute.org/ojpcr/4_2natp.htm. Situs ini dilihat pada tanggal 7 Juni 2007.

Tabel
BEDA ANTARA DAMAI POSITIF DAN DAMAI NEGATIF

	KETERANGAN	DAMAI POSITIF	DAMAI NEGATIF
1	CIRI-CIRI	<ul style="list-style-type: none"> • Damai jangka panjang • Bukan sekadar ketiadaan perang • Mempromosikan keadilan, kepercayaan, dan empati 	<ul style="list-style-type: none"> • Damai sementara • Sekadar ketiadaan perang • Menyimpan bibit permusuhan dan saling curiga
2	PENEKANAN	Kerja sama dan dialog	Kontrol dan kendali keamanan
3	STRATEGI	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan hubungan antara kelompok (asosiatif) • Damai dimulai dari bawah ke atas (<i>trickle up strategy</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Memutus hubungan antara kelompok (disasosiatif) • Damai dimulai dari atas ke bawah (<i>Trickle down strategy</i>)
4	INTERAKSI SOSIAL	Tinggi	Rendah
5	ORGANISASI SOSIAL	<ul style="list-style-type: none"> • Unit kecil • Otonom • Orientasi keragaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit besar • Pemusatan • Orientasi penyeragaman
6	ORIENTASI KEBIJAKAN	Mengelola sebab-sebab kekerasan: sikap dan struktur	Menghapus kekerasan yang bersifat langsung
7	IMPLIKASI	Menjamin damai jangka panjang	Mengarah kepada kekerasan yang lebih besar di masa depan

berkelanjutan.

Tulisan ini berusaha memotret secara umum wacana yang berkembang di kalangan para aktor *peacebuilding* di daerah-daerah bekas konflik kekerasan (Aceh, Pontianak, Ambon, dan Poso) dalam merespons dinamika perubahan paska konflik. Sorotan ini dimaksudkan untuk memahami persepsi mereka mengenai proses-proses pembangunan perdamaian yang telah dan tengah berlangsung. Tinjauan kritis terhadap wacana yang berkembang dapat memberikan gambaran sejauh mana proses-proses *peacebuilding* yang berlangsung itu telah mengarah kepada upaya mengatasi akar-akar penyebab konflik dan bukan sekadar menyelesaikan konflik di permukaan saja.

Tiga isu utama akan menjadi fokus pembahasan tulisan ini. *Pertama*, pemaknaan dan refleksi kritis terhadap situasi kemanan dan perdamaian di empat daerah bekas konflik setelah meredanya konflik kekerasan. *Kedua*, potret umum mengenai dampak konflik terhadap masyarakat yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang ditangani oleh para aktor *peacebuilding* di lapangan. *Ketiga*, tantangan-tantangan baru yang tercipta akibat terjadinya perubahan konteks *peacebuilding* baik pada tingkat lokal maupun nasional.

Keamanan dan Perdamaian Paska Konflik: Refleksi Kritis

Masyarakat di daerah-daerah konflik memang telah memperoleh kembali rasa aman dalam pengertian terlepas dari rasa takut terhadap ancaman pembunuhan,

pembakaran, perang, dan aksi-aksi kekerasan lainnya. Roda kehidupan ekonomi mulai bergulir meskipun belum seratus persen pulih. Birokrasi pemerintahan jalan, sementara kegiatan pendidikan tampak berlangsung normal. Namun demikian, kerisauan akan kembalinya situasi konflik tidak hilang sama sekali. Sebab-sebab lama bercampur dengan kompleksitas masalah baru dapat saja menjadi hamparan rumput kering yang mudah terbakar hanya karena percikan api. Pada saat yang sama, banyak harapan mengemuka: peningkatan kualitas kehidupan sosial-ekonomi, peningkatan kualitas proses-proses politik, perbaikan tata pemerintahan, peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemenuhan hak-hak dasar khususnya bagi perempuan dan anak.

Tiga masalah utama dianggap berpotensi menjadi faktor penyebab konflik muncul kembali. Tapi bila mampu dikelola dengan baik akan menjadi faktor pencipta perdamaian yang signifikan. *Pertama*, isu politik lokal seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang mencakup politik bagi kekuasaan dan politik identitas. *Kedua*, segregasi sosial berdasarkan ikatan etnis dan agama. *Ketiga*, isu-isu kemiskinan dan keterbelakangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok masyarakat tak mampu, khususnya korban konflik. Ketiga masalah tersebut sejatinya sulit dilepaskan satu dengan yang lain. Namun untuk kepentingan analisis, masing-masing akan dilihat sebagai fokus masalah dengan mempertimbangkan kasus-kasus yang menonjol di masing-masing wilayah bekas

konflik.

Power Sharing dan Politik Identitas

Masalah konflik sosial baik yang bersifat komunal (Ambon, Poso, Sambas-Sampit), maupun politik (Aceh) tidak dapat dipisahkan dari persaingan dan bahkan perebutan terhadap sumber-sumber kekuasaan. Kedua jenis konflik acap membawa-bawa isu identitas sebagai cara memperkuat posisi tawar dalam mencapai tujuan kekuasaan (*power struggle*).³ Kenyataan ini sesuatu yang lumrah saja dalam konteks politik masyarakat multi-etnis, sejauh persaingan memperoleh sumber-sumber politik dan ekonomi itu dikelola secara kelembagaan dan diekspresikan dengan cara-cara damai. Namun persoalan akan menjadi bertambah rumit manakala konflik yang bersifat instrumental itu diperparah oleh hubungan sosial yang diwarnai oleh kecugraan dan rasa permusuhan serta prasangka yang dipupuk dan dikembangkan dari waktu ke waktu.

Di Poso, Ambon, dan Kalimantan Barat, agenda bagi kekuasaan (*power sharing*) acap menjadi isu yang sensitif terutama karena melibatkan sentimen agama dan kesukuan. Di Ambon dan Poso representasi keagamaan, sementara di Kalimantan Barat representasi kesukuan. *Power sharing* di dalam birokrasi pemerintahan dianggap sebagai satu keniscayaan politik yang harus terus dijaga

guna menjamin stabilitas. Akibatnya, beberapa aktor politik akan selalu tergoda untuk memobilisasi sentiman agama dan etnik demi alasan representasi kelompok. Masalah ini akan sukar diantisipasi dan dikendalikan apabila kebijakan *power sharing* ini belum dilembagakan dan diterima sebagai budaya politik bukan hanya di tingkat elite, tapi juga di kalangan masyarakat. Pasalnya, meskipun tidak serta-merta memicu konflik kekerasan, isu ini akan memupuk kekecewaan-kekecewaan di tingkat masyarakat akibat elite politik lebih mementingkan kepentingan jangka pendek daripada program-program yang berdampak positif kepada masyarakat. Bersama dengan tumpukan masalah lain, kekecewaan-kekecewaan tersebut akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja.

Dalam konteks politik multi-etnis, seperti di Ambon, membawa-bawa simbol etnik tertentu dalam urusan pemerintahan dapat memicu sentimen etnis. Apapun alasannya, perilaku politik seperti ini beresiko apakah itu dilakukan oleh suku mayoritas-pribumi atau sebaliknya. Kasus pengukuhan Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Jakobus Puttileihalat, menjadi La Ode Puttileihalat, oleh masyarakat Buton yang notabene suku pendatang di Maluku, bisa menjadi semacam persoalan bagi suku pribumi. Memang hal ini tidak langsung memicu kekerasan komunal, tapi lagi-lagi ekspresi

³ Robert Bates, "Ethnic Competition and Modernization in Contemporary Africa", dalam *Comparative Political Studies* 6, Januari, 1974.

kesukuan dalam ranah publik apabila tidak dinegosiasikan dan disepakati di tingkat kelembagaan politik, bisa saja berkontribusi terhadap disharmoni sosial.⁴

Berbeda dengan ketiga daerah di atas, di Aceh, karena secara etnis cukup homogen, *power sharing* antara komunitas dalam masyarakat bukanlah isu yang menonjol. Sebaliknya, masalah politik lebih bersifat struktural, antara pemerintahan lokal dengan pemerintahan pusat di Jakarta. Namun terkait dengan politik identitas, banyak kalangan yang pro damai mengharapkan bahwa GAM dapat mentransformasi identitas militeristiknya ke dalam kultur politik yang lebih sipil dan demokratis. Untuk jangka pendek hal ini memang tidak mudah karena sekian puluh tahun mereka hidup dalam kultur militer. Namun, proses ini hanya akan berhasil apabila kelompok-kelompok *civil society* di Aceh memperkuat konsolidasi guna mengawal dan mendorong proses-proses politik yang demokratis di Aceh.

Hubungan antara Komunitas: Eksklusivisme Ikatan-ikatan Sipil (Civic Links)

Di daerah yang multi-etnis dan agama, konflik acap terjadi apakah karena alasan persaingan memperebutkan sumber-sumber, alasan identitas, patronase,

dan alasan kebijakan-kebijakan publik.⁵ Masalahnya bukan sekadar konflik itu sendiri, tapi apakah konflik-konflik komunal tersebut diatasi dengan keke-
rasan atau dengan cara-cara damai dan berbasis kelembagaan? Seperti yang banyak dikemukakan oleh para analis, konflik komunal di Indonesia banyak terjadi karena perebutan sumber-sumber ekonomi dan politik. Namun, konflik itu akan berbuah kekerasan komunal manakala sentimen agama dan kesukuan dimobilisasi untuk tujuan-tujuan instrumental tersebut. Pada daerah yang memiliki sejarah permusuhan antara suku dan agama, kondisi seperti ini sangat rawan dimanipulasi oleh oknum-oknum yang mengail di air keruh.

Pandangan seperti ini tampaknya umum di kalangan aktor *peacebuilder* di daerah-daerah konflik komunal. Mereka jelas mengkhawatirkan kondisi segregasi sosial berdasarkan agama dan etnis yang masih kental di beberapa tempat, meskipun di tempat yang lain sudah cukup cair.⁶ Masalah segregasi sosial ini paling tidak mencerminkan bahwa meskipun kekerasan tidak lagi muncul, saling percaya antara komunitas belum cukup terbangun. Dengan menekankan isu ini, dapat dibaca bahwa para aktor *peacebuilding* percaya bahwa hubungan sosial yang kohesif dan

⁴ Laporan hasil FGD Pengembangan Modul Peacebuilding di Ambon, tanggal 16 Desember 2006.

⁵ Ashutosh Varshney, *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*, (Second Edition, New Haven & London: Yale University Press, 2004), hlm. 25

⁶ Di Ambon, misalnya, relokasi komunitas pelaku konflik di Batu Merah tidak dibarengi dengan rekonsiliasi yang tulus karena masih menyisakan dendam. Sementara relokasi di Ahuru relatif berhasil membangun rasa saling percaya di antara kelompok yang pernah saling bertikai.

integratif dapat menjadi faktor penting yang dapat menjamin ketahanan masyarakat dari setiap provokasi dan manipulasi politik yang dilakukan oleh elit. Namun bagaimana caranya membangun hubungan sosial yang kohesif di antara komunitas yang pernah tercabik-cabik oleh perang yang saling menghancurkan dan yang masih menyisakan dendam dan prasangka?



Gereja yang dibakar di sitobondoo 2005

www.tempinteraktif.com

Di kalangan aktivis perdamaian di Poso, misalnya, ada pemikiran bahwa semata-mata menyerahkan perdamaian kepada kearifan sejarah masyarakat tidaklah cukup untuk menjadikan komunitas yang berbeda kebal terhadap setiap provokasi. Pasalnya, meskipun elite di Poso sadar bahwa konflik kekerasan yang telah terjadi bukan disebabkan oleh agama, masyarakat awam tidak bisa begitu saja membuang dari ingatan kolektif mereka bahwa konflik yang terjadi melibatkan penghancuran simbol-simbol suci keagamaan. Guna membangun rasa saling percaya yang *genuine* antara komunitas, adalah penting untuk melakukan rekonstruksi fakta-fakta konflik di Poso secara obyektif dan menjadikan fakta obyektif itu sebagai narasi dominan yang terus-menerus disebarluaskan kepada masyarakat umum. Gagasan ini dapat disarikan dari proposal Alex, seorang aktivis perdamaian dari Patambo Crisis Center:

...kita sering mengatakan bahwa di Poso bukan konflik agama, tapi tidak mau membuka data investigatif bahwa yang terjadi ini. Jadi, cairnya hubungan ini masih ada yang mengganggu di antara dua komunitas. Kita sering berbicara rekonsiliasi bahwa ini bukan persoalan agama walaupun melihat simbol agama yang keluar tapi kita pernah memaparkan data-data investigasi seperti ini di Poso. Sebenarnya yang harus dilakukan, membangun kesadaran secara obyektif di tingkat masyarakat bahwa Poso 1998 bukan itu yang terjadi (yakni konflik agama). Ini yang harus dipaparkan agar kemudian rekonsiliasi kita tidak menggantung.... Itu konflik elit, tapi sebagian masyarakat melihat mesjid dan gereja dibakar, simbol-simbol agama yang keluar...di tingkat masyarakat, mereka sekarang paham *baku bae* untuk hidup di masa depan.. Tapi sesuatu yang substansi mereka tidak paham... apa yang terjadi di Poso menurut saya itu sebagai ruang-ruang celah negatif yang disimpan dan diwariskan kepada anak cucu...⁷

Rekonstruksi narasi dominan tentang sejarah konflik memang berguna untuk melihat bahwa konflik-konflik yang

⁷ Laporan hasil FGD Pengembangan Modul-modul Peacebuilding di Tentena, 14 Desember 2006.

mungkin disebabkan oleh situasi yang sangat lokal dan multi-varian ternyata memiliki kaitan dengan konteks yang lebih luas. Namun, semata-mata mengandalkan rekonstruksi narasi besar ini tidak akan dapat mencegah sebab-sebab konflik muncul kembali selama kehidupan sipil masyarakat masih didasarkan pada ikatan-ikatan sipil (*civic links*) yang bersifat eksklusif dan intra-etnik dan agama. Yang mesti dikembangkan adalah ikatan-ikatan sipil yang lintas etnik dan agama sehingga upaya apapun dari elite politik yang mencoba memanfaatkan identitas primordial untuk mengipas-kipas konflik komunal tidak akan mempan. Malahan mereka mau tidak mau harus menggunakan cara-cara lintas etnik dan agama untuk membangun koalisi politik yang kuat.⁸

Pengembangan relasi-relasi sosial berbasiskan asosiasi-asosiasi sukarela, modern dan berorientasi kewargaan, bukan komunal, sesungguhnya tidak mungkin berhasil manakala mengabaikan budaya yang hidup dalam masyarakat. Dengan kata lain, nilai-nilai kesukarelaan dan kewargaan lintas agama dan suku yang selama ini dipraktikkan dalam masyarakat sudah seharusnya dikembangkan dan ditransformasikan ke dalam kelembagaan sosial yang lebih modern. Adalah keliru menganggap bahwa nilai-nilai modernitas dapat dicangkokkan begitu saja tanpa membangun terlebih dahulu legitimasi

internal dari budaya setempat. Pasalnya, masyarakat akan menolak sistem dan institusi asing sebelum sistem dan kelembagaan itu cocok atau dibenarkan oleh sistem kepercayaannya. Barangkali kurangnya penguatan legitimasi internal ini yang menjadikan kerja-kerja *peacebuilding* selama dirasakan artifisial dan tidak mengakar di masyarakat.

Kemiskinan dan Ketidakberdayaan Ekonomi

Barangkali isu kemiskinan termasuk masalah yang oleh sebagian analis acap tidak dikaitkan langsung dengan faktor penyebab munculnya kembali konflik kekerasan di masyarakat kita. Pasalnya, tidak semua daerah di mana kemiskinan cukup merisaukan hati konflik sosial berdarah-darah. Namun, dilihat dari perspektif perdamaian yang sejati di mana indikator umumnya keadilan sosial, kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan sendirinya menjadi faktor yang dapat mendorong konflik kekerasan untuk jangka panjang. Lebih dari itu, fakta bahwa kemiskinan mencolok mata itu sendiri menunjukkan bahwa damai sejati tidak benar-benar menghampiri.

Di semua daerah paska konflik, aktor *peacebuilding* sepakat bahwa keamanan dan perdamaian banyak ditentukan oleh tingkat kesejahteraan masyarakat. Artinya, semakin sejahtera masyarakat sema-

⁸ Ashutosh Varshney, *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*, hlm. 39

kin kecil kemungkinan mereka terlibat konflik kekerasan atas nama apapun. Memang kemiskinan itu sendiri tidak dapat menjadi faktor tunggal yang menyebabkan konflik. Namun, kemiskinan akan menjadi lahan yang subur bagi penguatan identitas komunal manakala menimpa komunitas lokal yang mengidentifikasi diri sebagai kelompok pribumi dan apalagi mayoritas. Persoalan putra daerah yang berpendidikan rendah dan karenanya kurang mampu bersaing memperoleh akses ke dalam kerja-kerja sektor formal menjadi isu sosial di beberapa daerah di Kalimantan Barat.

Seperti disinggung di atas masalah-masalah konflik ekonomi dalam masyarakat bisa lebih mudah diatasi dengan jalan menegosiasikan masalah bersama dengan pihak-pihak yang terlibat. Pandangan yang menekankan pentingnya negosiasi ini mencuat di antara kalangan aktivis perdamaian di Kalimantan Barat yang risau dengan kesenjangan antara etnis China yang notabene pemilik modal/majikan dengan etnis Melayu yang menjadi pekerja. Isu upah kerja, hak-hak pekerja, jam kerja, dsb. menjadi agenda yang krusial untuk segera dinegosiasikan dengan pihak-pihak terkait. Namun inisiatif seperti ini tampaknya belum sungguh-sungguh ditindaklanjuti.

Pemberdayaan sosial-ekonomi berbasis komunitas dianggap oleh banyak kalangan sebagai salah satu jurus ampuh mengatasi masalah kesenjangan sosial. Pemberdayaan sosial mesti diprioritaskan kepada mereka yang paling membutuhkan, khususnya para korban konflik,

perempuan dan anak, dan mencakup penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan dan kualitas pendidikan.

Dampak Konflik: Respons Masyarakat dan Aktor-aktor Peacebuilding

Konflik kekerasan yang berlarut-larut di Ambon, Poso, Sambas-Sampit, dan Aceh telah menyisakan dampak yang cukup dalam bagi masyarakat, baik pelaku maupun korban konflik. Masyarakat pada umumnya telah belajar dari konflik kekerasan yang melibatkan mereka baik sebagai aktor maupun korban. Mereka menganggap konflik tersebut sebagai kesalahan yang tidak perlu diulangi lagi. Di Aceh misalnya indikasi ini bisa dilihat dari proses-proses perdamaian yang berjalan mulus. Mulai dari Kesepakatan Helsinki, penyerahan senjata dan penarikan pasukan TNI yang dipantau oleh Aceh Monitoring Mission (AMM), hingga Pilkada yang aman dan demokratis. Di Ambon, setelah konflik mereda, masyarakat mulai belajar dari kekeliruan, menemukan kembali nilai-nilai dan simbol-simbol budaya yang menyatukan mereka dan mencoba untuk merevitalisasinya. Dewasa ini konsep-konsep kearifan lokal seperti: "kita bersaudara" (*katong basudara*), Pela Gandong, Salam-Sarani, Siwalima, Acang-Obet, dsb. mulai dihidupkan kembali.

Di Ambon dan juga di Poso ada kesan yang kuat, paling tidak terungkap dari peserta FGD, bahwa masyarakat memiliki kearifan dan sikap untuk menghadapi konflik kekerasan dan segala dampaknya.

Sebut saja, “modal sosial”. Kearifan dan keberanian ini sebagian ditunjukkan oleh ibu-ibu yang berjualan. Pada saat-saat di mana pergerakan sangat dibatasi oleh adanya ancaman kekerasan, ibu-ibu dari kelompok agama yang berbeda-beda berani menerobos wilayah konflik untuk berjualan. Dengan cara begini mereka membuka dan memperbanyak zona-zona damai. Langkah terobosan yang dilakukan oleh ibu-ibu karena alasan melanjutkan kehidupan merupakan proses pembangunan perdamaian yang *genuine* dari masyarakat, meskipun tidak terekam dalam catatan sejarah resmi.

Memang harus diakui bahwa tidak semua kelompok masyarakat di daerah konflik benar-benar mau belajar dari pengalaman. Di Ambon misalnya meski secara umum masyarakat menyadari pentingnya hidup harmonis dan mengembangkan toleransi, beberapa kelompok masih menunjukkan kecenderungan yang eksklusif, kalau bukan radikal. Memang kecenderungan eksklusivisme ini disinyalir sebagai gejala luar yang diimpor ke dalam Ambon. Pada saat konflik 2004, eksklusivisme ini tampil dalam unjuk kekuatan identitas dengan merusak simbol-simbol suci seperti gereja atau masjid. Anak-anak sering menjadi korban yang mudah diprovokasi dan dimobilisasi untuk melakukan penyerangan ke pihak lawan. Eksklusivisme pemahaman keagamaan memang bukanlah arus utama, tapi

apabila dibiarkan dapat mempengaruhi pikiran generasi muda khususnya. Di sisi lain, stigmatisasi kelompok keagamaan Muslim sebagai teroris dan Kristen sebagai separatist masih coba dihembus-hembuskan. Padahal, sebagaimana dikatakan Raja Negeri Tulehu, John Ohorela, sebagian orang Kristen seperti di Kuda Mati sendiri berharap jangan mereka diindentikan dengan RMS (Republik Maluku Selatan).⁹

Kekhawatiran-kekhawatiran munculnya kembali aspirasi kekerasan dari kelompok yang bertikai masih ada di sela-sela optimisme bagi terciptanya hubungan dan keadaan damai yang permanen. Di Aceh, misalnya, karakteristik militer mantan kombatan GAM tidak mudah diubah dalam waktu singkat, perlu waktu untuk transformasi mereka kepada kehidupan dan budaya sipil. Dalam proses transformasi itu, aspirasi-aspirasi lama tidaklah mudah lenyap meski keadaan telah berubah. Namun apapun kenyataannya, satu hal yang dapat mendorong mereka untuk kembali angkat senjata: yaitu perasaan diabaikan dan dizalimi. Sekarang ini, tantangan yang dihadapi masyarakat Aceh bukan semata-mata bagaimana membangun kepercayaan politik dengan pemerintah pusat, tapi bagaimana mengelola kepentingan-kepentingan politik internal secara demokratis demi mendayagunakan dan mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia untuk

⁹ Laporan hasil FGD Pengembangan Modul Peacebuilding di Ambon, tanggal 16 Desember 2006

kesejahteraan masyarakat Aceh. Asma-wati, salah seorang aktivis Liga Inong Aceh (LINA) yang bekerja untuk pemberdayaan perempuan mantan kombatan GAM, mengatakan:

...kenapa muncul konflik? Kenapa mereka (GAM) ingin mengatakan MoU Helsinki itu hanya langkah awal? Mungkin ada keinginan lain, keinginan lain hanya mewujudkan keadilan sebenarnya. Pada intinya, keadilan dalam segi politik dan keadilan dalam segi ekonomi, ya? Kita banyak melihat masyarakat-masyarakat di desa yang pendidikannya sangat rendah, sehingga sangat mudah diprovokasi. Jadi, saya kira strategi kalau kita ingin melanjutkan perdamaian ini adalah menciptakan keadilan dari segi ekonomi dan juga meningkatkan pendidikan *grassroot*..¹⁰

Dampak terhadap Korban Konflik dan Penanganannya

Meskipun konflik-konflik di empat daerah ini berbeda sifat dan faktor penyebab dan pemicunya, satu hal yang jelas, kesemuanya telah menimbulkan korban yang dilemahkan oleh konflik kekerasan. Penanganan korban konflik ini menjadi agenda yang kini dihadapi oleh aktor-aktor *peacebuilding* di lapangan, baik pemerintah ataupun kalangan LSM. Isu manajemen pengungsi korban konflik telah memunculkan kompleksitas tersendiri, dan tidak jarang memicu konflik baru. Bukan hanya masalah pemenuhan hak-hak dan kebutuhan dasar pengungsi yang kurang diperhatikan, kebijakan

relokasi pengungsi ke tempat baru acap menimbulkan ketegangan mengenai status tanah (Ambon). Aparat dinilai sering memaksakan kebijakan tanpa terlebih dahulu mendialogkan persoalan relokasi dan kepastian hukum tanah yang ditempati pengungsi. Di Poso, persoalan pengungsi korban konflik ini telah lebih jauh menyingkap isu baru, akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan dana Jatah Hidup (Jadup). Korupsi dana pengungsi menjadi isu baru yang muncul paska konflik kekerasan.

Pemberdayaan anak dan perempuan korban konflik merupakan agenda yang menjadi konsen *peacebuilding* namun kurang tertangani dengan baik. Dampak konflik Aceh masih terasa sampai sekarang terutama bagi anak-anak dan perempuan. Banyak anak putus sekolah dan janda korban konflik. Tekanan yang dihadapi oleh korban konflik di Aceh bertambah dengan bencana Tsunami tahun 2004 lalu. Masalahnya bertumpuk dari persoalan kebutuhan dasar, pendidikan, hingga psikologis. Jangankan untuk pemulihan yang psikologis, ekonomi saja mereka tidak dapat apa-apa. Muncul ironi. Musibah Tsunami kadang-kadang mendatangkan rahmat bagi orang lain bukan yang mengalami musibahnya. Program rehabilitasi Aceh sekarang tampaknya tidak sungguh-sungguh diarahkan untuk menjamin bahwa para korban

¹⁰ Laporan hasil FGD Pengembangan Modul Peacebuilding di Banda Aceh, tanggal 14 Desember 2006

tersebut memperoleh prioritas pemberdayaan dari proyek-proyek rehabilitasi. Banyak kontraktor yang tidak mau memakai sumber daya lokal dengan alasan di samping harus bayar mahal, juga alasan kualitas kerjanya kurang bagus.

Munculnya NGO internasional pasca Tsunami telah ikut membawa kompleksitas tersendiri bagi proses-proses pembangunan perdamaian berkelanjutan di Aceh. Masyarakat korban konflik ataupun Tsunami makin terbiasa dengan bantuan dan karitas. Akibatnya, tawaran-tawaran pemberdayaan yang tidak menyertakan bantuan material cenderung diabaikan. Memang wajar apabila mereka memprioritaskan kebutuhan pokoknya sehari-hari. Namun, kurangnya konsolidasi antara LSM pendampingan korban pengungsi terhadap konstruk mental ini akan menjadi kendala tersendiri untuk membangun kemandirian korban pengungsi untuk kembali hidup normal di tengah-tengah masyarakat.¹¹ Laporan hasil FGD Pengembangan Modul Peacebuilding di Banda Aceh, tanggal 14 Desember 2006

Proses pendampingan perempuan dan anak di Kalimantan Barat telah coba dilakukan. Tapi tampaknya masih belum sistematis dan terencana. Para pekerja *peacebuilding* masuk melakukan pendampingan dengan modal semangat *volunteer* membantu meringankan beban korban. Tapi tidak ada instrumen yang solid untuk

melihat dampak pendampingan. Ada LSM yang mungkin siap dengan instrumen tapi tidak berkelanjutan. *Save the Children* misalnya pernah melakukan kegiatan pendampingan. Namun program itu terputus, padahal korban sesungguhnya masih membutuhkan. Tampaknya LSM-LSM lokal perlu meningkatkan kemampuannya untuk dapat meningkatkan peran dalam mendukung para korban konflik anak dan perempuan agar dapat kembali meraih harapan hidupnya. Anak-anak korban konflik dari Madura hingga sekarang masih menyimpan trauma dari konflik kekerasan yang melibatkan orangtua mereka. Reny, aktivis Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, menu-turkan sebagai berikut:

...di daerah Tebang Kacang yang tersisa pada waktu kerusuhan kemarin tinggal ibu-ibu dari suku Madura, karena suaminya sudah meninggal. Nah, mereka juga punya anak-anak, trauma anak-anak ini ketika mereka diajak *having fun*, diajak menggambar, mereka menggambar senjata, pemotongan (kepala, penulis sic!) apa yang mereka lihat waktu kejadian kerusuhan kemarin, sampai saat ini. Trauma-trauma ini kalau tidak ada yang melakukan konseling, melakukan rekonstruksi pemikiran, mereka mungkin beberapa tahun ke depan tetap akan angkat senjata, pikiran mereka akan perang.¹²

Konflik tidak selalu memperlemah anak dan perempuan, adakalanya justru

¹¹ Laporan hasil FGD Pengembangan Modul Peacebuilding di Banda Aceh, tanggal 14 Desember 2006

¹² Laporan hasil FGD Pengembangan Modul Peacebuilding di Pontianak, tanggal 14 Desember 2006

menjadi sumber kekuatan perdamaian. Di Ambon misalnya, memang cukup banyak ketika anak-anak dan ibu-ibu yang mengeluhkan dampak langsung dari konflik: baik ekonomi, kesejahteraan maupun kebutuhan biologis bagi ibu-ibu. Namun tidak sedikit juga anak-anak dan perempuan yang berpartisipasi dalam perdamaian. Sementara bapak-bapak sangat emosional, sehingga selalu saja terlibat dalam aksi-aksi kekerasan.

Dampak lain dari konflik kekerasan yang berlarut-larut adalah menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, serta anak putus sekolah. Di sisi lain, aktor-aktor konflik yang lain dapat memperoleh sumber-sumber ekonomi dan menikmati kesejahteraan. Di Aceh, dampak ekonomi dan sosial ini sangat dirasakan oleh mantan kombatan GAM yang konon berjumlah 20 ribuan. Mereka tidak memiliki skill, tidak punya pendidikan, keahliannya hanyalah berperang. Respons terhadap mantan kombatan ini adalah dengan memberikan mereka uang sebesar 25 juta per orang. Tujuannya adalah pemberdayaan ekonomi agar mereka dapat menggunakannya untuk modal ekonomi. Alih-alih yang terjadi sebaliknya, sebagian besar mantan prajurit GAM menggunakan uang tersebut untuk membiayai hidupnya. Mereka mengalami situasi deprivasi sosial. "Kemaren kami itu harimau di hutan, tapi sekarang kambing di kota." Begitu kira-kira ungkapan yang menggambarkan kondisi kombatan GAM.

Pergeseran dan Perubahan Konteks: Tantangan Peacebuilding Dewasa Ini

Seperti yang diuraikan di atas, konflik kekerasan yang terjadi masih menyisakan dampak langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dapat kita saksikan pada ratusan bahkan ribuan korban konflik. Khususnya anak dan perempuan, di barak-barak pengungsian, yang masih menderita fisik maupun psikis. Dampak langsung juga dapat kita saksikan pada fenomena aktor konflik yang pernah terlibat perang. Keduanya ternyata membutuhkan bantuan, pendampingan dan pemberdayaan. Pada saat yang bersamaan upaya-upaya rekonsiliasi di antara para kombatan yang saling bertikai dan integrasi kombatan ke dalam kehidupan masyarakat merupakan agenda yang masih terus berjalan.

Dampak tak langsung dari konflik adalah akibat yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata, tapi dirasakan ada, dan mewujud dalam berbagai bentuk gejala sosial. Suasana kecurigaan dan belum terbangunnya kepercayaan antara pihak-pihak yang bertikai tercermin dalam kenyataan segregasi sosial baik berdasarkan agama maupun etnis. Pada tataran politik, dampak ketidakpercayaan ini akan terkuak melalui aksi-aksi teror politik, provokasi dengan menggunakan simbol-simbol agama maupun etnis. Pendek kata, secara umum konflik kekerasan ini telah memperlemah kemampuan masyarakat untuk mendialogkan, memperdebatkan, memperjuangkan dengan cara-cara damai tentang apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan sosial

dan politik mereka selaku warga negara yang setara. Dengan kata lain, masyarakat kehilangan kesempatan untuk berlatih dan terbiasa untuk menggunakan *public reason*-nya.

Selain dampak terlihat dan tak terlihat itu, terdapat konteks sosial politik dan ekonomi di tingkat lokal yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam melihat kerja-kerja perdamaian dewasa ini. Salah satu yang bisa dikemukakan di sini, kebijakan otonomi daerah termasuk pemberian hak-hak istimewa kepada Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, misalnya. Salah satu implikasi dari hak-hak istimewa yang diperluas untuk Aceh adalah penerapan syariah Islam. Timbul pertanyaan: apakah syariah dapat menjadi pemersatu atau pemicu konflik untuk selanjutnya. Ada pandangan yang mengatakan bahwa penerapan syariah Islam setengah-setengah menimbulkan ketidakadilan, khususnya di kalangan perempuan. Asmawati dari Liga Inong Aceh (LINA) mengatakan demikian:

Misalnya, orang diproses karena dituduh *khalwat* terus dicambuk. Padahal dalam Islam cambuk itu untuk berzina. Orang yang korupsi ratusan juta hanya dicambuk, harusnya hukumannya lebih besar dari hukuman bagi pencuri. Aktivis perempuan di Aceh melihat ini sebagai hal yang mempermalukan perempuan. Banyak perempuan sebagai ibu rumah (baca: kepala keluarga), harus mencari

nafkah. Mereka dibebani dengan hal lainnya, mungkin dia pergi bekerja dan bekerjanya harus dengan laki-laki, kadang-kadang mitra kerjanya di satu ruangan, tempatnya sunyi-sunyi, terus kena *khalwat*.¹³

Hal lain yang juga mempengaruhi konteks sosial-ekonomi adalah bencana Tsunami dan bencana alam lainnya yang menimpa daerah-daerah konflik dan non-konflik. Tampak bahwa peristiwa besar di satu daerah begitu kuat mempengaruhi setting sosial daerah lainnya. Di Ambon misalnya, puluhan LSM internasional dan lokal yang bekerja di Ambon berbondong-bondong ke Aceh karena tuntutan tanggap darurat. Ini dengan sendirinya mempengaruhi proses *peacebuilding* di Ambon.

Di sisi lain, keterlibatan LSM asing di Aceh pasca Tsunami membawa dampak plus dan minusnya. Terjadi perubahan karakter sosial di masyarakat Aceh. Kebutuhan semakin meningkat, muncul kecenderungan materialisme dan bahkan mementingkan diri sendiri di satu sisi, dan kemalangan korban Tsunami di sisi lain.

Kesimpulan

Telah ada kesadaran yang cukup kuat di kalangan para aktivis perdamaian bahwa pembangunan perdamaian pasca konflik kekerasan haruslah diarahkan pada upaya merekonstruksi struktur damai di dalam masyarakat guna membangun

¹³ Laporan hasil FGD Pengembangan Modul Peace-building di Banda Aceh, tanggal 14 Desember 2006

landasan yang kokoh bagi damai jangka panjang. Namun demikian, dinamika perubahan yang terjadi akibat perubahan konteks sosial, ekonomi, dan politik menuntut aktor-aktor perdamaian untuk segera meresponsnya dan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Akibatnya, hampir semua energi diarahkan untuk mengatasi persoalan-persoalan baru yang juga menuntut perhatian dan dukungan. Contoh yang paling gamblang adalah tanggap darurat terhadap korban bencana alam yang memang tidak bisa menunggu waktu. Pada saat yang sama, sebagian pekerja perdamaian masih bergelut dengan pekerjaan rumah menangani dampak langsung dari konflik yang menimpa para korban di lokasi-lokasi pengungsian dan relokasi. Ini semua menjadikan konsolidasi untuk membangun perdamaian jangka panjang masih jalan di tempat atau masih menunggu waktu yang tepat.

Merefleksikan pandangan-pandangan para aktor *peacebuilding* di daerah bekas konflik, tampak bahwa paradigma pem-

angunan perdamaian di masa depan bagaimanapun harus berpijak pada penguatan masyarakat sipil. Paradigma ini mengandaikan bahwa masyarakat sipil adalah pihak yang menentukan apakah potensi konflik dalam masyarakat akan diarahkan pada kekerasan atau dikelola secara kreatif dan ditransformasikan ke dalam relasi-relasi sosial-politik yang konstruktif. Masyarakat sipil yang akan menjadi penopang damai jangka panjang dicirikan oleh relasi-relasi organis antara asosiasi-asosiasi yang bersifat terbuka, sukarela, dan modern. Hubungan sosial yang semata-mata didasari oleh ikatan-ikatan komunal bagaimanapun tidak lagi cukup memadai menjadi fondasi bagi masyarakat sipil yang tahan banting khususnya di dalam konteks sistem politik negara bangsa pasca kolonial. Oleh sebab itu, ketimbang mempertahankan lembaga komunal secara apa adanya, akan jauh lebih bermakna mentransformasikan nilai-nilai kewargaan yang terkandung dalam kebijakan lokal ke dalam asosiasi-asosiasi yang lebih modern dan rasional. ❖